



DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT: BENIH, CIKAL-BAKAL, DAN KELAHIRAN TENTARA INDONESIA 1945-1947

Atno, Nanda Julian Pratama✉

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2018
Disetujui Juni 2018
Dipublikasikan Juli 2018

Keywords:
pioneer, TNI, 1945-1947

Abstrak

Tulisan ini akan menyoroti bagaimana proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan utama yang coba akan diangkat adalah bagaimana proses awal kelahiran TNI itu sendiri baik itu unsur pembentuk dan organisasi awal dalam institusi ini terbentuk. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan tulang punggung perjuangan bangsa Indonesia, terutama beberapa saat menjelang kemerdekaan. Keberadaannya amat penting dalam rangka mempertahankan negara Indonesia yang baru saja lahir. Namun lahirnya institusi ketentaraan di Indonesia bukanlah merupakan perkara yang mudah. Ada cukup banyak perdebatan awal mengenai bagaimana institusi ini akan dibawa. Berikut juga unsur-unsur dalam ketentaraan itu sendiri, mengingat secara garis besar institusi awal ketentaraan Indonesia berasal dari mereka yang merupakan didikan Belanda (KNIL) dan Jepang (PETA), serta kekuatan lain ditengah-tengah rakyat seperti organisasi massa dan laskar. Tulisan ini akan mencoba mengurai masalah awal yang dihadapi TNI ketika akan terbentuk lewat sebuah penelitian dengan menggunakan metode sejarah sebagai acuan akademis.

Abstract

This paper will highlight how the Indonesian National Army was born. The main problem that is trying to be raised is how the initial process of the birth of the TNI itself was both the constituent elements and the initial organization in this institution was formed. The Indonesian National Army (TNI) was the backbone of the Indonesian struggle, especially just before independence. Its existence is very important in order to defend the Indonesian state that was just born. But the birth of military institutions in Indonesia is not an easy matter. There is enough initial debate about how this institution will be brought. Here are also elements in the army itself, given that in general the institutions of the Indonesian army originated from those who were the Dutch (KNIL) and Japanese (PETA), as well as other forces in the midst of the people such as mass organizations and laskar. This paper will try to unravel the initial problems faced by the TNI when it will be formed through a study using historical methods as an academic reference.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Ada beberapa permasalahan muncul terkait dengan merdekanya Indonesia tanggal 17 agustus 1945. Setelah merdeka kita tidak hanya dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya politis seperti pembentukan parlemen, penetapan undang-undang, pembagian wilayah politis, hingga pemilihan kepala Negara dan wakilnya. Masalah lain yang penting adalah bagaimana mempertahankan Republik Indonesia yang kala itu masih bisa dikategorikan sebagai negara yang rapuh kalau tidak bisa dikatakan “belum siap”. Seperti yang dikatakan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, “Negara zonder tentara, bagaimana bisa?”, Dalam kaitan ini para pemimpin Republik kala itu mesti pula memikirkan sebuah badan atau instansi yang berwenang dalam hal mengamankan keamanan negara baik dari gangguan yang sifatnya internal maupun eksternal. Maka dengan pertimbangan yang semacam itu direalisasikan sebuah badan keamanan yang dikenal dengan BKR (Badan Keamanan Rakyat) lewat sebuah sidang PPKI tanggal 22 agustus 1945 (Lubis, 2005:153).

Namun pembentukan institusi yang bersifat militer ini bukanlah sebuah perkara mudah. Republik Indonesia dihadapkan pada beragam persoalan yang muncul terkait dengan masalah ini. hal-hal tersebut mulai dari unsur tentara pembentuk, penyatuannya, memilih bentuk organisasi yang tepat, hingga pemilihan pemimpin (panglima) menjadi perkara yang mewarnai proses kelahiran institusi militer ini. tulisan ini sekadar mengingatkan kembali bagaimana TNI lahir dalam riuhnya dunia Revolusi Indonesia kala itu, kemudian menjelaskan unsur-unsur yang menjadi bagian dari Tentara itu sendiri, hingga prosesnya yang mantap dengan menjadi Tentara Nasional Indonesia, bukan sekadar badan keamanan yang statusnya simpang-siur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkah dalam metode ini yaitu; heuristik yang terdiri dari studi

pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mencari sumber ke perpustakaan. Kritik sumber terdiri dari kritik internal dan eksternal; interpretasi, merupakan tahap dimana data yang diperoleh diseleksi, dicari kausalitasnya satu dengan yang lain untuk kemudian dirangkai dan disusun menjadi sebuah deskripsi; dan historiografi, merupakan penyajian hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah yang tersusun secara sistematis dan kronologis menjadi sebuah analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Tentara sebelum Indonesia Merdeka: KNIL dan PETA

Sebelum Indonesia merdeka (ketika dijajah Belanda dan Jepang), setidaknya ada dua institusi militer yang dominan yang nantinya punya pengaruh besar dalam dinas ketentaraan Indonesia merdeka. Jika kita urutkan berdasarkan umurnya maka KNIL yang mesti didahulukan. KNIL merupakan institusi tentara bentukan Kolonial Belanda, yang berumur lumayan panjang jika kita bandingkan dengan PETA yang hanya berumur sekitar 2 tahun. Tentara KNIL dianggap punya kemampuan militer yang mumpuni karena mereka mengalami pendidikan yang lumayan lama. Disamping itu KNIL juga memiliki jiwa organisasi yang baik, karena mereka cukup solid dalam wadah KNIL itu sendiri. Namun disamping semua keahlian yang dimiliki oleh eks-tentara KNIL tersebut mereka juga memiliki sejumlah kelemahan. Beberapa kelemahan KNIL yang patut dicatat adalah mereka umumnya tercerai-berai, bukan sebuah rahasia lagi salah satu buronan yang paling dicari oleh Jepang selain warga kulit putih adalah mereka yang merupakan eks-tentara KNIL (walaupun nanti ada pengecualian, eks-tentara KNIL pribumi akan dilebur dalam organisasi semi-militer Jepang, atau paling tidak jadi pengajar pendamping) (Nasution, 1984:49-57). Namun yang masalah yang paling penting adalah ego, tentara KNIL agak susah berbaur dengan kelompok lain, inilah salah satu yang menghambat ketika banyaknya eks-KNIL akan

bertikai dengan eks-PETA ataupun milisi lainnya (Anderson, 1988:267-268).

Namun KNIL tak sepenuhnya buruk, setidaknya ada beberapa anggota KNIL yang nantinya menjadi bagian dari pucuk Pimpinan tentara Indonesia nantinya. Ada dua nama yang punya jasa dalam hal ini, Urip Sumoharjo dan Didi Kartasasmita. Urip yang pangkat terakhirnya adalah Mayor (pangkat tertinggi pribumi dalam KNIL) punya pengetahuan yang baik tentang pengorganisasian dan ini yang menjadi pemecah dalam masalah organisasi tentara Indonesia nantinya. Sedangkan Didi lebih condong pada hal-hal yang berbau politis, dia diketahui dekat dengan Otto Iskandardinata, yang nantinya punya pengaruh terhadap pembentukan BKR pada sidang PPKI ke III. Jasa lain yang dilakukan keduanya adalah ketika mereka berhasil meyakinkan kembali para eks-KNIL yang lainnya untuk bergabung dengan Tentara Indonesia ketimbang kembali pada kesatuan KNIL Belanda yang datang tak jauh setelah bulan agustus 1945.

Bagian terbesar lain dalam Tentara Indonesia adalah mereka yang mantan didikan militer Jepang atau yang mayoritas dari eks-PETA (sedangkan di Sumatera lebih dikenal dengan Giyugun). Walaupun mereka mendapat didikan secara singkat dan terkesan spontan kalau tak bisa dibilang "seadanya", kemampuan tempur mereka cukup mumpuni dan baik. PETA dibentuk sekitar tahun 1943, dengan cikal-bakal pendidikannya yaitu diwilayah Tangerang. Pendidikan militer ala PETA secara garis besar dikatakan keras, karena disana diajarkan disiplin yang penuh layaknya seorang tentara dan penuh dengan hukuman jika melanggar satu saja peraturan atau latihan (Lubis, 2005:77-78). Sama halnya dengan KNIL, PETA juga memiliki beberapa keunggulan dan juga kekurangan. Beberapa hal yang bisa diajukan sebagai keunggulan PETA adalah mereka muda, kuat dan enerjik. Hal ini berkenaan dengan segi fisik karena memang yang menjadi syarat untuk menjadi anggota PETA adalah berumur muda. Selain itu mereka juga punya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan (Anderson, 1988:267).

Namun yang tak kalah penting para tentara PETA pada umumnya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi serta jiwa anti-barat yang tinggi pula. Ini tidaklah mengherankan karena selain mendapat pendidikan secara militer, mereka juga mendapat pelajaran mengenai Nasionalisme yang pelajaran tersebut secara langsung diberikan oleh Sukarno. Sukarno awalnya hanya ditugaskan hanya menanamkan semangat anti-barat pada personil PETA, namun secara tersirat kalimat-kalimat pidatonya juga mengandung nilai-nilai Nasionalisme, hal ini yang ditangkap oleh para personil PETA yang "paham" sedangkan sisanya hanya menafsirkan kalimat itu secara harfiah. Kegiatan Sukarno ini belakangan akhirnya terendus oleh petinggi militer Jepang, yang mengakibatkan dia tidak terlalu terlibat kembali dalam pengorganisasian PETA selanjutnya. Selain itu, diperkirakan jumlah tentara PETA mencapai angka 120.000 personil pada pertengahan 1945, dan ini menjadi tulang punggung personil tentara Indonesia nantinya (Kahin, 1995:156).

PETA juga memiliki beberapa kekurangan selain keunggulannya tadi. Kelemahan PETA yang terutama adalah yang sifatnya teknis, organisasi. Jepang mungkin secara brilian mendidik para pemuda Indonesia dengan pendidikan militer yang disiplin dan mumpuni dalam perang dengan waktu yang singkat, namun mereka mengabaikan pentingnya pengorganisasian dalam tubuh tentara itu sendiri. Hal ini kemudian berakibat secara tidak langsung dikemudian hari, dimana institusi ketentaraan Indonesia bisa dikatakan lemah secara organisasi dengan berganti-gantinya bentuk dari BKR hingga menjadi TNI (Simatupang, 1981:87-88). Tokoh-tokoh sentral PETA dan eks-didikan semi-militer Jepang lain yang nantinya punya pengaruh dalam tentara Indonesia adalah Soedirman dan A.H. Nasution. Soedirman, seorang pecandu kretek tulen dan mantan guru ini kemudian di daulat menjadi panglima, *track record*-nya pun lumayan bagus untuk kaliber tentara Indonesia. Soedirman berhasil mengkonsolidasi penyerahan besar-besaran senjata tentara Jepang didaerahnya dan juga peranannya dalam pertempuran terutama di

Magelang (Anderson, 1988:273-274). Kemudian pemuda Nasution yang dikenal mendapat dua pendidikan militer baik itu masa Belanda dan Jepang juga secara brilian menyatukan milisi-milisi muda Bandung eks Seinendan yang nantinya merupakan cikal-bakal dari satuan Kodam Siliwangi.

Milisi Lain Pendukung Militer: Para Jagoan, Santri, dan Unsur-Unsur Lainnya

Unsur dalam tentara Indonesia kala awal berdiri bukan hanya dimiliki oleh mereka yang berstatus murni militer. Setidaknya ada beberapa jargon non-militer yang turut dalam euforia revolusi, bahkan juga turun langsung dalam pertempuran. Pada bagian pertama akan dibahas tentang para jagoan dalam unsur tersebut. Jago atau jagoan bukanlah pemain baru dalam dunia ketentaraan Indonesia, mereka setidaknya telah lama dikenal dalam urusan “penjagaan keamanan” sebuah wilayah dengan bayaran tertentu. Salah satu yang terkenal ada di wilayah Jakarta, mereka menamakan diri mereka API (Angkatan Pemuda Indonesia). Terdengar seperti sebuah gerakan pemuda intelek, namun API bertanggung jawab atas serangkaian teror dan kriminalitas (perampokan dan pembunuhan) terhadap warga Belanda, Cina, maupun Pribumi pada awal berdirinya Republik. Apalagi ketika API berfusi dengan pentolan preman senen pimpinan Imam Syafe’I (Bang Pi’i) dan Haji Darip (Cribb, 2010:80-88). Disamping itu masih banyak lagi organisasi pemuda yang condong ke militer di Indonesia, seperti: Gerpri (Jogjakarta), Pelopor (Jakarta), Amri (Bandung), PRI (Surabaya), PRI (Bandung), IPI (Jakarta), dan lain-lain (Anderson, 1988:282-285).

Para golongan Santri pun yang berasal dalam lingkungan religius tak mau ketinggalan dalam euforia ini. organisasi semi militer dari kalangan Islam pada waktu itu terkenal dengan Hizbullah. Hizbullah merupakan salah satu produk binaan Jepang yang diproyeksikan sebagai pendamping PETA, lulusan kadetnya lumayan banyak walaupun masih jauh untuk menyaingi PETA. Pasca kemerdekaan mereka kemudian berafiliasi dengan Partai Masyumi, dan diketahui punya andil besar dalam berbagai

pertempuran melawan Belanda mendampingi Tentara Indonesia terutama di wilayah Priangan (Cribb, 2010:102-103).

Di wilayah Sumatera, tepatnya wilayah Sumatera utara ada sebuah gerombolan yang menamakan dirinya Brigade Macan Liar. Gerombolan ini terdiri atas petani dan buruh yang mendapat pendidikan militer alakadarnya dari seorang polisi rahasia Jepang. Seringkali pendidikan semi-militer yang diberikan kepada orang awam seperti itu diberikan oleh eks-militer Jepang maupun Belanda. Namun yang menyulitkan terkadang apa yang mereka ajarkan tidak cepat dicerna oleh orang awam, sehingga terkadang komando seringkali terputus dan mereka punya tujuan lain dalam revolusi (Vickers, 2011:153-162).

Namun pembentukan milisi pendukung ini tak sepenuhnya berjalan mulus. Pada awal pembentukan para organisasi dan laskar pendukung militer Indonesia ini seringkali mereka terlibat berbagai konflik kecil dengan tentara sendiri yang sebetulnya malah melemahkan militer sendiri. Hal-hal seperti saling mencurigai atau mendahului wewenang sangat kentara pada awal pembentukan Republik. Nasution yang secara brilian menggabungkan laskar-laskar dalam divisinya di wilayah Bandung pun tak luput dari problematika semacam ini. Rasa saling percaya satu sama lain pun akhirnya berganti dengan sikap saling curiga. Hal ini yang kemudian memaksa Nasution untuk melucuti senjata para laskar. Sebagian dari mereka menerima hal tersebut, namun sebagian lain memilih untuk menolak kemudian menyeberangi garis demarkasi dan lebih memilih ditampung oleh Belanda (Nasution, 1984:153-162). Puncak konflik antara tentara dan laskar atau organisasi militer pendukungnya adalah ketika Hatta menggaungkan konsepsinya tentang re-organisasi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat banyaknya laskar tersebut memilih membelot dan memberontak pada Republik.

Perkembangan Tentara Indonesia: Dari Badan Militer Hingga Tentara Nasional Indonesia

Setelah Indonesia Merdeka, hal lain yang dibutuhkan selain aparaturnya Negara adalah pembentukan sebuah instansi keamanan atau militer. Hal ini baru terealisasi pada sidang PPKI yang ke III, dimana salah satu isinya adalah pembentukan sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR disambut positif oleh rakyat Indonesia yang kemudian secara spontan membentuk sebuah organisasi atau laskar pendukung militer, atau dengan meleburkan diri pada organisasi yang ada. BKR kemudian bekerja salah satunya dibawah naungan KNI-KNI setempat (hal dikarenakan mungkin belum ada Komando terpadu militer kala itu) (Ricklefs, 2005:433). Badan ini sebenarnya diproyeksikan secara sederhana sebagai badan yang bertugas hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Namun lebih dari itu mereka (BKR) menjelma menjadi sebuah badan revolusi-revolusi daerah, baik itu melakukan perebutan kekuasaan atau sekadar pelucutan senjata tentara Jepang yang sudah hilang moralnya akibat kekalahan di PD II (Djamhari, 1995:1-9). Perlu diketahui bahwa BKR sama sekali bukan lembaga Negara dan murni hanya badan perjuangan rakyat. Segera setelah dibentuk, BKR lewat beberapa pemuda Prapatan 10 dan beberapa eks-militer PETA seperti M.T Haryono, Soebadio, dan Moerdijatmo berkeliling Jawa untuk mempromosikan BKR serta membujuk eks-PETA dan KNIL untuk bergabung dan berpartisipasi didalamnya sesuai dengan daerah BKR-nya masing-masing (Loebis, 1995:111).

Kemudian mengingat situasi revolusi yang makin genting, kemudian status ketentaraan yang simpang-siur dalam BKR, pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat tanggal 5 oktober 1945. Untuk mempermudah kerja pemerintah, maka ditunjuklah Urip Sumoharjo sebagai pendesain pertama keorganisasian Tentara yang pertama ini. Secara ringkas maklumat itu juga menjelaskan mengenai unsur-unsur dari tentara itu sendiri yang mayoritas merupakan eks-PETA dan KNIL. Disamping itu mereka yang masih muda, sehat, dan sempat mendapat pelatihan militer dari kedua unsur sebelumnya diharapkan untuk secepatnya mendaftarkan diri menjadi tentara di daerahnya masing-masing. Unsur yang ketiga ini adalah mereka yang berada dalam organisasi kepemudaan dan laskar-laskar yang banyak tersebar diseluruh Indonesia. Setelah itu tanggal 20 oktober 1945, pemerintah kemudian memilih pucuk pimpinan tentara ini. Posisi menteri keamanan rakyat ad interim dipegang oleh Muhammad Sulyoadi Kusumo. Pos untuk panglima ditunjuklah Supriyadi, Pahlawan Pemberontakan PETA di Blitar, namun hingga proses terima jabatan Supriyadi tidak pernah muncul bahkan dikabarkan tewas. Urip sendiri ditunjuk Menjadi kepala staf dengan pangkat Letnan Jenderal.

Urip yang merupakan mantan pentolan KNIL, kemudian mendesain organisasi tentara yang bermarkas di Yogyakarta. Markas Tinggi TKR (MT-TKR) ini kemudian disusun juga bersama Komandemen dan divisi-divisinya.

Tabel 1. Tabel jumlah divisi dan resimen MK-TKR

Komandemen I Jawa Barat Pimpinan Mayor Jenderal Didi Kartasmita	Komandemen II Jawa Tengah Pimpinan Mayor Jenderal Suratman	Komandemen III Jawa Timur Pimpinan Mayor Jenderal Muhammad	Komandemen Sumatra Pimpinan Suhardjo Hardjowardojo
3 Divisi	4 Divisi	3 Divisi	6 Divisi
17 Resimen	15 Resimen	10 Resimen	15 Resimen

Ketika dirasa masalah organisasi hampir selesai, muncul masalah lain dalam tubuh tentara itu sendiri, lowongnya kursi panglima. Kehadiran seorang Panglima amat penting untuk mempersatukan golongan Tentara yang mudah sekali tercerai dan sekaligus menaikkan moral tentara itu sendiri. Maka digagaslah sebuah pertemuan pada November 1945 untuk memilih Panglima. Nama Urip Sumoharjo digadang-gadang bakal mengisi pos ini, namun rupanya dia kalah pamor dari eks-PETA, Sudirman. Sebenarnya hal ini wajar karena ketika diambil voting, mayoritas pemilih merupakan Eks-PETA, jadi bisa dipastikan Eks-PETA pula yang akan menang, walaupun dengan prosentase suara yang tak terpaut jauh. Nama Sudirman kala itu memang menjadi buah bibir karena keberhasilannya dalam medan pertempuran serta mengakomodasi penyerahan senjata tentara Jepang. Disamping prestasi itu Sudirman juga berhasil, “mengambil hati” Eks-KNIL maupun unsur tentara lain dan cenderung ingin bersatu dibawah komandonya, selain dia kemudian merangkul Urip Sumoharjo sebagai kepala stafnya. Mereka seakan berbagi tugas dalam institusi ini, Sudirman mengurus hal-hal yang sifatnya persatuan tentara dan politis sedangkan Urip pada masalah teknis dan organisasi (Anderson, 1988:273-275).

Pada Tanggal 24 Januari 1946, pemerintah RI lewat Presiden mengeluarkan dekrit tentang perubahan nama dari TKR menjadi TRI. Selanjutnya tanggal 23 february 1946, pemerintah kemudian menetapkan penyempurnaan organisasi, dengan membentuk panitia yang bertugas untuk:

1. Membentuk kementerian pertahanan
2. Mencari bentuk ketentaraan
3. Kekuatan tentara
4. Organisasi tentara
5. Menyempurnakan bentuk peralihan dari TKR ke TRI dan menentukan status laskar dan badan perjuangan.

Bisa dikatakan bahwa ini re-organisasi pertama dalam angkatan perang Indonesia,

dimana hasilnya akan menciutkan jumlah jumlah divisi yang ada di Jawa yang sebelumnya berjumlah 10 divisi menjadi 7 divisi dan 3 brigade di Jawa Barat serta 3 divisi di Sumatera. Kemudian bila laskar-laskar tidak mau meleburkan diri dalam TRI akan diberikan wadah perjuangan khusus bernama Biro Perjuangan.

Kemudian pada tanggal 7 juni 1947 presiden kembali mengeluarkan keputusan terkait dengan status ketentaraan di Indonesia, keputusan itu berisi mengenai perubahan nama TRI menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan menyatakan semua laskar dan badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke dalam TNI. Sedangkan untuk pucuk pimpinannya sendiri tidak banyak berubah seperti panglima besar masih di jabat Jendral Besar Sudirman, dengan anggota-anggotanya yaitu: Letjend Urip Sumoharjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Muda S. Suryadharma, Soetomo, Ir. Sakirman, dan Djokosujono. Dengan demikian bahwa badan perjuangan dan wadah bagi pejuang-pejuang Indonesia adalah TNI semata (Djamhari, 1995:8-10).

SIMPULAN

Tentara Nasional Indonesia punya andil yang besar dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Mereka seakan berbagi tugas dengan pemimpin Republik yang mengurus bidang politis dan mereka bidang perang di lapangan. Namun hadirnya institusi militer di Indonesia bukanlah suatu mudah. Banyak tahap dan proses hingga konflik untuk mencapai satu kesatuan tentara yang utuh. Mulai dari pembentukan BKR yang status dan unsurnya yang simpang siur hingga perubahan nama berkali-kali hingga menjadi TNI. Dalam BKR sendiri unsur tentara murni belum bisa diproyeksikan, karena selain yang jelas seperti eks-PETA dan KNIL, badan ini juga diramaikan oleh banyaknya laskar dan organisasi pendukung revolusi. Hal ini secara tersirat baik, namun kemudian menimbulkan masalah baru yaitu ego. Siapa yang mampu

mengontrol serta apakah mereka mau dikontrol dalam satu kesatuan. Kemudian pemerintah mengeluarkan konsepsi mengenai badan ketentaraan lewat pembentukan TKR. Dalam TKR ini mulai ada kejelasan mengenai status tentara itu sendiri.

Pucuk pimpinan juga penting juga penting dalam institusi ini, kehadiran seorang panglima besar juga dipercaya bisa menaikkan moral prajurit. Setelah Supriyadi tak kunjung hadir, maka Sudirman terpilih menjadi panglima besar dengan Urip Sumoharjo menjadi kepala stafnya. Dua sosok ini lah yang memiliki jasa besar terhadap pembentukan dan perkembangan embrio militer Indonesia menjadi sebuah institusi yang solid baik dalam komando militer dan kesatuan organisasi. Pada akhirnya lewat serangkaian reorganisasi yang memunculkan pro dan kontra, tentara Indonesia beradaptasi lewat bentuk yang baru yaitu Tentara Nasional Indonesia yang bertahan hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ben. 1988. Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cribb, Robert .2010. Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta 1945-1949, Jakarta: Masup Jakarta.
- Djamhari, Drs. Saleh As'ad. 1995, Ihktisar Sejarah Perjuangan ABRI (1945-sekarang. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- Kahin, George McTurnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Sebelas Maret University Press Bekerja Sama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Loebis, Aboe Bakar. 1995. Kilas Balik Revolusi, Kenangan, Pelaku, Dan Saksi, Jakarta: Penerbit UI-PRESS.
- Lubis, Prof. Dr. Nina H., M.S., dkk. 2005. PETA, Cikal Bakal TNI, Bandung: MSI Cab. Jabar.
- Nasution, DR. A.H. 1984. Memenuhi Panggilan Tugas: Jilid I. Jakarta: Gunung Agung.
- MC. Ricklefs. 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.
- Simatupang, TB. 1981. Pelopor Dalam Perang, Pelopor Dalam Damai, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Vickers, Adrian. 2011. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Penerbit Insan Madani.